



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA EVALUASI PENDIDIKAN TINGGI (EV. DIKTI) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI;2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;3. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;4. Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti;5. Dirjen Penguatan Inovasi;6. Dirjen Riset dan Pengembangan;7. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI;
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 Juli 2017.
Pukul	: 13.00 WIB (setelah Rapat Paripurna DPR RI)
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Evaluasi Dikti.
Sekretaris Rapat Acara	: Sarilan Putri Kh, S.Sos./Kabag. Komisi X DPR RI. <ol style="list-style-type: none">1. Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi.2. Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi.3. Capaian dan Permasalahan Pendidikan Tinggi.4. Tantangan Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Era Disrupsi.
Hadir Anggota Panja	: 15 orang dari 28 Anggota Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A./Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI beserta jajarannya;2. Prof. Intan Ahmad, Ph.D/Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI beserta jajarannya;3. Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc./Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti RI beserta jajarannya;4. Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D/Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI beserta jajarannya.5. Drs. H. Hadirin Suryanegara, MAP/Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI beserta jajarannya;

6. Dr. Muhammad Dimiyati/Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI beserta jajarannya; dan
7. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum./Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.00 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Evaluasi Dikti, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekjen Kemenristekdikti RI; Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI; Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI; Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI; dan Dirjen Riset dan Pengembangan (Pejabat Eselon I Kemenristekdikti RI), serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kemenristekdikti RI menyampaikan paparan dan penjelasan kepada Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI, antara lain sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Staregis/Indikator Sasaran Strategis (SS/IKSS) sebagaimana Rencana Strategi Kemenristekdikti RI 2015-2019 untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

SS/IKSS	2017		Target 2018	Target 2019
	Target	Realisasi		
Indeks Inovasi	16,85	48,56*	24,82	32,41
Indeks Pendidikan Tinggi	26,17	39,86	34,12	42,25
Indeks Reformasi Birokrasi	75	71,23	80	85

*masih pada tahap rewiu dan analisis

2. Beberapa Indikator Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Program Peningkatan Sumberdaya pada tahun 2017 yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut:

Program	Indikator Program	Target 2017	Realisasi 2017
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	65%	55,07%
	Lulusan PT yang langsung bekerja	65%	63%
	PT yang menerapkan SN Dikti	75%	67,72%
	Mahasiswa yang lulus PPG	96%	67,13%
Program Peningkatan Sumberdaya	Jumlah SDM yang meningkat karirnya	19.228	14.561
	Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	2.141	1.669
	Jumlah revitalisasi Sarpras PTN	118	1

3. Pengeluaran per mahasiswa dibanding GDP Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara yang diteliti OECD pada 2015. Beberapa catatan terkait anggaran untuk Riset dan Pendidikan Tinggi antara lain:
 - a. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai subjek kena pajak, akan meningkatkan biaya pendidikan tinggi dan menghambat upaya peningkatan akses masyarakat ke pendidikan tinggi.
 - b. Pembiayaan PNBP/BLU di PTN hanya berkisar antara 21% sampai 26%.
 - c. Pemanfaatan anggaran PNBP sebagian besar (kurang lebih 80%) diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Tridharma PT dan sekitar 20% untuk belanja modal.
 - d. Ruang fiskal untuk beasiswa dosen dan investasi makin terbatas. Anggaran Rupiah Murni untuk belanja pegawai mengalami kenaikan setiap tahunnya (tahun 2018 mencapai 56% dari total Rupiah Murni).
 - e. Anggaran penelitian yang bersumber dari PNBP diharapkan dapat mencapai 10% dan bersumber dari BLU diharapkan dapat mencapai 15%, karena anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sangat tergantung dari besaran dana BOPTN.
 - f. Pemanfaatan anggaran BLU untuk gaji dan tunjangan rata-rata sebesar 31% karena BLU harus membayar remunerasi dan tidak dibayarkan dari Rupiah Murni.
4. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:
 - a. Penerbitan Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti RI.
 - b. Pembentukan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SiMonev).
 - c. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat melalui *Quick Wins* berupa "Pembentukan Unit Layanan Terpadu".
 - d. Mewajibkan setiap PTN dan Kopertis melaksanakan reformasi birokrasi dengan membentuk Tim RB PTN/Kopertis, membuat Peta Jalan PTN/Kopertis, dan menentukan *Quick Wins*.
5. Strategi kemenristekdikti menghadapi era Industri 4.0 dan era disrupsi, antara lain:
 - a. Paradigma Tri Dharma Perguruan Tinggi harus diselaraskan dengan era Industri 4.0.
 - b. Format baru sistem pembelajaran *Cyber University*, menerapkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis *hybrid/blended learning/online*.
 - c. Komitmen peningkatan investasi di pengembangan *digital skill*.
 - d. Selalu mencoba dan menerapkan *prototype* teknologi terbaru (*learn by doing*).
 - e. Menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan *digital skill*.

- f. Memperkuat kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan *skill* bagi era digital masa depan.
- g. Menyusun kurikulum pendidikan (reorientasi kurikulum) dengan memasukkan materi terkait *human digital skill*.

B. Sikap dan pandangan Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI:

1. Meminta Kemenristekdikti RI untuk meninjau ulang dan melakukan sinkronisasi setiap paparan yang disampaikan, supaya konsisten dan komprehensif, sebagai bahan tak terpisahkan dari penyusunan Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.
2. Meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan langkah-langkah strategis terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan belum tercapai, serta menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkeu RI maupun BAPENAS RI, terkait antara lain mengenai:
 - a. Peningkatan alokasi anggaran Ristek dan Dikti.
 - b. Pajak Pendidikan Tinggi.
4. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk memperbarui panduan kurikulum Pendidikan Tinggi untuk semua jenis pendidikan tinggi (Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi).
5. Meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan revitalisasi Perguruan Tinggi, mulai dari sumber daya manusia, kelembagaan, sampai sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi, dalam menghadapi era industri 4.0.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.10 WIB

KETUA RAPAT,



DR. IR. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP

